BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) kini menjadi negara *superpower* di panggung politik internasional. Dengan kekuatan militer tanpa tandingan, AS mampu mendiktekan berbagai kebijakan luar negerinya ke seantero penjuru dunia. Bukan hanya dominasi dalam kebijakan politik dan militer, tetapi juga melalui globalisasi AS menanamkan budaya-budayannya kepada negara-negara lain. Namun, dominasi tersebut juga menuai persoalan, berbagai kebijakan politik yang terlalu agresif telah melahirkan kritik, permusuhan bahkan kebencian. Dalam peta politik internasional, sikap permusuhan terhadap Amerika Serikat bisa terlihat merentang mulai dari Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur dan juga dunia Islam.

Tragedi yang terjadi pada 11 September 2001, merupakan pukulan bagi AS. Serangan itu akan menjadi sejarah yang tak akan terlupakan bagi AS dan masyarakat dunia. Tragedi yang menyerang gedung *World Trade Center* (WTC), serta serangan yang terjadi terhadap gedung Pentagon, yang merupakan dua simbol kekuatan dan kedigdayaan AS dalam bidang ekonomi dan militer di abad 21 ini sangat menyakitkan sekaligus mengancam hegemoninya.

Serangan itu memaksa AS harus menerima kenyataan pahit, dan menunjukan bahwa tak ada lagi negara yang bebas dari ancaman kekerasan politik, termasuk AS sendiri. Secara psikologis, serangan itu telah menimbulkan

rasa takut dan goncangan yang sangat hebat, khususnya dalam jiwa dan pikiran warga AS yang membuat mereka kembali mempertanyakan mengapa para teroris begitu membenci AS. Serangan yang dimotori oleh orang Islam tersebut semakin memperkuat stigma Barat akan Islam sebagai ideologi kaum teroris. Berdasarkan informasi dan data intelijen, pemerintahan Bush menetapkan Osama Bin Laden dengan kelompoknya, Al-Qaeda, sebagai kelompok yang harus bertanggungjawab, dan Al-Qaeda pun mengaku bertanggungjawab atas serangan atas serangan tersebut (www.freedom-institute.org/id/doc/utk_web-paramadina.doc).

Menyusul peristiwa yang mengerikan tersebut, pemerintah AS mengambil kebijakan strategis untuk memerangi terrorisme. Sebagai respon atas ancaman teroris global, AS menyatakan perang total terhadap teroris yang dikenal dengan kebijakan *War On Terrorism* yang siap dijalankan ke dalam maupun ke luar melalui operasi berjenjang meliputi, cara diplomasi, penggunaan kekuatan militer, dengan finansial, investigasi, pengefektifan *Homeland Security* dan aksi-aksi kemanusiaan (Brokers, 2003 : 171).

Homeland Security merupakan strategi untuk melindungi AS dari pihak luar yang ingin menghancurkan masyarakat AS, kebebasan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah AS. Selain menangkal dan melindungi dari serangan teroris, juga untuk mempererat hubungan negara-negara bagian AS untuk bersama-sama melindungi rakyat AS. Karena untuk menjalankan keamanan nasional diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari rakyat, negara bagian, pemerintahan, organisasi maupun rekan bisnis. Selain itu *Homeland Security*

Strategy juga mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di dunia internasional, seperti wabah penyakit (*pandemic diseases*), senjata nuklir atau senjata pemusnah massal (*the proliferation of weapons of mass destruction*), terorisme (*terrorism*), dan bencana alam (*natural disaster*) (*National Strategy For Homeland Security 2007*).

Kebijakan *War On Terrorism* yang dikeluarkan AS tersebut tertuang dalam *National Security Strategy* (NSS) yang dikeluarkan pada September 2002. Setiap negara pasti akan berusaha melindungi setiap warganya dan berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya, tidak terkecuali AS. Dalam hal ini, melindungi keamanan nasional negara merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan suatu negara. AS sendiri menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai prioritas utama dalam kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan, invasi, penaklukan, pengrusakan wilayah AS dan ancaman terhadap warga negaranya (Art, 2003 : 48).

Oleh karena itu, pasca serangan 9/11 yang menyerang wilayah AS, presiden AS George W Bush membuat sebuah strategi keamanan nasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang dikenal dengan *The National Security Strategy Of The United States Of America.* Dengan dikeluarkannya strategi tersbut, selain untuk mempertahankan negara dan wilayahnya, AS juga menggunakan untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman dari luar.

Kemudian AS mulai merancang langkah-langkah strategis untuk melakukan pembalasan terhadap mereka yang dianggap AS harus bertanggungjawab, dan negara yang ditengarai menjadi pendukung aksi teror tersebut. Melalui sektor

finansial, pemerintah AS memblokir serta membekukan asset para teroris serta orang atau lembaga yang diperkirakan berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris. Pada sisi lain, AS pun terus menggalang koalisi global dengan mengajak negara-negara dunia bersama-sama untuk memerangi aksi-aksi terorisme internasional (NSS 2002 : 6).

Karena sejalan dengan pidatonya George Bush di West Point, New York pasca serangan 9/11, mengenai perang terhadap teroris dan menuntut semua negara di dunia untuk mengutuk terorisme serta mengancam negara-negara yang tidak bersedia mengikuti ajakannya, yaitu :

> "setiap bangsa di setiap daerah (regional) sekarang harus membuat keputusan, kalian bersama kami (AS) atau kalian bersama teroris, mulai hari ini dan seterusnya, setiap bangsa yang menyediakan tempat atau mendukung terorisme akan dianggap AS sebagai rezim musuh." (Yuliantoro, dalam : rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/119.pdf.diakses Oktober 2009).

Sebagai negara *Super Power*, setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Amerika Serikat akan berdampak langsung secara global, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Indonesia. Bahkan sejak tragedi 9/11, perhatian AS terhadap kawasan ASEAN yang selama ini kecil menjadi berubah secara drastis. Kawasan yang tadinya dianggap aman bagi kepentingan AS, mulai diwaspadai akan munculnya jaringan terorisme internasional yang dapat mengancam kepentingannya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam NSS 2002, AS menyatakan ingin memerangi terorisme baik dengan pertempuran maupun dengan penyebaran pahan sekuler dan demokrasi, terhadap

ideologi yang dianggap AS mendukung berkembangnya terorisme, yaitu : Mendukung pemerintahan moderat dan modern, terutama di dunia Muslim, untuk memastikan bahwa kondisi dan ideologi yang mendukung terorisme tidak menemukan tempat untuk berkembang di negara manapun (2002 : 6).

Dengan dikeluarkannya kebijakan *War On Terroism,* hal ini jelas sangat berdampak terhadap negara-negara berideologi Islam, yang dituduh sebagai ideologi yang mendukung terorisme. Tidak terlepas juga Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, ikut terkena imbasnya walaupun Indonesia bukan negara berideologikan Islam. karena dalam NSS 2006 beberapa negara Islam diduga sebagai tempat para teroris, dan salah satunya adalah Indonesia.

Yang terkena dampak secara tidak langsung dari kebijakan tersebut adalah kelompok dan gerakan-gerakan Islam. Keterlibatan orang-orang Islam dalam beberapa aksi terorisme, semakin memperkuat stigma Barat terhadap Islam sebagai ideologi teroris, hingga mencari-cari keterkaitan antara gerakan Islam di Indonesia dengan jaringan terorisme internasional, seperti Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah yang di vonis AS sebagai pelaku serangan WTC dan Pentagon (Ibrahim & Romli, 2007:21).

Kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai warna dan rasa serta sebagai pedoman bagi sebuah negara atau pemerintahan, dianggap Barat sebagai kelompok yang selalu menggunakan kekerasan untuk mencapai dan memperjuangkan kepentingannya. Terlebih lagi mereka (umat Islam) yang memperjuangkan penerapan syariat Islam dan menyerukan

menentang (melawan) AS, di cap sebagai Islam radikal (Ibrahim & Romli, 2007:19).

Radikalisme gerakan Islam di Indonesia muncul dan dipicu oleh persoalan domestik disamping juga oleh konstelasi politik internasional yang dinilai memojokan kehidupan sosial politik umat Islam. Dalam konteks domestik, diakibatkan berbagai kemelut yang melanda umat Islam (tragedi Poso 1998 dan tragedi Ambon 1999) dimana umat Islam yang menjadi korban. Walaupun telah memakan korban, namun tidak segera mendapat penanganan oleh pemerintah. Hal inilah yang mendorong kelompok Islam tertentu berinisiatif melakukan tindakan untuk membantu saudara seagama mereka.

Dalam konteks internasional, realitas politik standar ganda AS dan sekutunya merupakan pemicu berkembangnya radikalisme Islam. AS dan sekutunya disamping telah menuduh orang-orang Islam sebagai pelakunya, juga telah menyamakan berbagai gerakan Islam dengan gerakan teroris. Selain itu, perang terhadap terorisme juga dimanfaatkan untuk menghadapi perlawanan gerakan Islam terhadap dominasi AS. (Turmudi dan Sihbudi, 2005 : 1-3).

Kelompok-kelompok Islam di Indonesia telah muncul sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, juga yang tumbuh subur pasca Orde Baru, yang kemudian karena aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, kelompok-kelompok tersebut dianggap radikal, tumbuh dan berkembang pada era reformasi ini. Dapat disebut beberapa organisasi Islam berhaluan radikal ini kemudian cukup memberikan pengaruh luas dalam kepolitikan di era transisi demokrasi. Kelompok tersebut antara lain, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ)

Ahlussunah wal Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Selain disebutkan diatas terdapat kelompok kecil yang berskala lokal, diantaranya Brigade Hizbullah di Makasar, Sabilillah dan FPI Surakarta, Ansharullah di Jakarta, Brigade Tholiban di Tasikmalaya dan sebagainya (Mubarak, 2007 : 110).

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus kelompok Majelis Mujahidin Islam (MMI). MMI bertujuan untuk menerapkan syariat Islam dan mendirikan negara Islam di Indonesia. Dalam Kongres tersebut dibahas pula mengenai masalah *Khilafah Islamiyah, Imamah dan Jihad* (Turmudi dan Sihbudi, 2005 : 248).

MMI merupakan sebuah gerakan sosial, karena memiliki perencanaan dan pertimbangan yang matang, serta pengorganisasian gerakan yang profesional dan memiliki ideologi yang kuat untuk menjalankan organisasinya, menyangkut sistem komando, rekruitment, dan pengajaran terhadap anggota-anggotanya, disamping juga memiliki aturan-aturan dan hukum yang diberlakukan oleh kelompoknya (Purnomo, 2009 : 2).

MMI memiliki semangat otoritarian, bahwa mereka percaya hanya Islam yang harus diterapkan sebagai dasar kehidupan. MMI pun memilih perjuangan politik dengan menekankan pada pembentukan opini maupun bersifat semi-militeristik. MMI menyatakan Islam tidak perlu toleran terhadap pluralisme dan keberagaman publik yang ditawarkan demokrasi (Denny, dalam http://www.islamlib.com/id/artikel/laskar-jihad-fpi-dan-mujahidin/diakses 10 Januari 2010).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas ummat Islam terbesar didunia, dipaksa untuk ikut memerangi dan menyelesaikan masalah terorisme internasional, yang pada dasarnya merupakan kepentingan AS. Dan disisi lain, kelompok dan gerakan-gerakan Islam merupakan salah satu aktor dalam politik Indonesia yang mengekspresikan nilai-nilai agama, terus diwaspadai karena dianggap sebagai pendukung gerakan-gerakan teror yang dipersepsikan oleh Barat khusunya Amerika Serikat.

Hal-hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengkajinya lebih jauh dalam rangka mengembangkan wawasan studi Hubungan Internasional. Dengan demikian penelitian ini diajukan dengan judul :

"**Pengaruh Kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Gerakan Islam Radikal di Indonesia (Studi Kasus Majelis Mujahidin Indonesia)**"

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Politik Internasional, karena melalui mata kuliah ini dapat dijelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, dimana dalam interaksi tersebut masing-masing negara membawa kepentingan negaranya masing-masing yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya.
2. Diplomasi Hubungan Internasional di Amerika Serikat, karena melalui mata kuliah ini dapat menjelaskan bagaimana hubungan AS dengan

negara-negara di dunia, bagaimana arah kebijakan pemerintah AS dalam memperoleh kepentingannya, dan bagaimana respon AS terhadap apa yang terjadi di dunia internasional.

3. Analisis Politik Luar Negeri, mata kuliah ini dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai politik luar negeri suatu negara, termasuk didalamnya kebijakan serta respon terhadap dinamika politik internasional, serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut terhadap lingkungan diluar wilayahnya.
4. Politik Luar Negeri Republik Indonesia, mata kuliah ini dapat menjelaskan mengenai arah kebijakan yang diambil pemerintahan indonesia dari tahun ke tahun, baik ke dalam maupun ke luar. Serta menggambarkan apa yang menjadi prioritas serta sasaran yang ingin dicapai pemerintah Indonesia.
5. Pemikiran Politik Islam, karena mata kuliah ini menjelaskan bagaimana konsep-konsep dan pemikran politik Islam sejak masa Rosulullah SAW melalui konsep negara Madinah (Piagam Madinah) sampai pemikiran politik Islam dewasa ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya-upaya Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan *War On Terrorism*?

2. Peran pemerintah Indonesia sebagai respon dari kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat?
3. Bagaimana reaksi kelompok Majelis Mujahidin Indonesia terhadap kebijakan *War On Terrorism*?
4. Bagaimanakah pengaruh kebijakan *War On Terrorism* terhadap perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya akan memusatkan pada upaya-upaya kebijakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme serta bagaimana respon kelompok atau gerakan Islam dalam menyikapi kebijakan tersebut. Masalah dibatasi dari tahun 2002 sejak dikeluarkannya kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat dan *The National Strategy For Combating Terrorism* 2006 dimana melalui kebijakan memerangi terorisme AS tersebut terus dilakukan dalam upayanya menghilangkan kelompok-kelompok radikal hingga sekarang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah dan bertitik tolak pada latar belakang penelitian dan pembatasan masalah diatas, maka masalah penelitian ini mempunyai rumusan pernyataan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Pengaruh Kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia Sebagai Salah Satu Gerakan Islam Radikal di Indonesia?”

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui upaya-upaya Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan *War On Terrorism*-nya.
2. Mengetahui peran pemerintah Indonesia sebagai reaksi dari kebijakan *War On Terrorism.*
3. Mengetahui reaksi kelompok Majelis Mujahidin Indonesia terhadap kebijakan *War On Terrorism.*
4. Mengetahui pengaruh dari kebijakan *War On Terrorism* terhadap perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah internasional. Khusunya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan Hubungan internasional.

1.5.3 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris bagi para penstudi Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap masalah mengenai kebijakan Amerika Serikat, khusunya mengenai strategi dan upaya-

upaya Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan pengaruhnya terhadap Majelis Mujahidin Indonesia sebagai Gerakan Islam Radikal di Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis Dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara dan antar bangsa dalam konteks sistem global. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak hanya memfokuskan perhatian dan pengkajiannya terhadap hubungan politik yang berlangsung antar bangsa dan antar negara yang runag lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku-pelaku negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi tersebut dapa berupa, kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*), dan pertentangan (*Conflict*). (Rudy, 2003:2)

Hubungan internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain diluar jurisdiksi efektif unit politiknya, (Steve Chan dalam Perwita dan Yani, 2005:7). Dari

definisi diatas terkaji bahwa negara bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari hubungan internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan-tindakan dan dampak dari tindakan tersebut adalah negara sebagai kelompok kepentingan dalam politik, walaupun tidak menutup kemungkinan yang melakukan aktor-aktor bukan negara. (Perwita & Yani, 2005:7)

Hubungan internasional juga tidak bisa lepas dari politik internasional. Politik internasional mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasan (*power*). Dimana pelaku dalampolitik internasional hanya terbatas pada pelaku negara (*state actor*) saja. Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 40).

Politik internasional mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara serta proses interaksi antar negara maupun negara dengan organisasi internasional pada tingkat pemerintah sebagai suatu struktur. Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditunjukan pada suatu negara atau negara-negara tertentu dan sifatnya lebih ditekankan pada masalah-masalah politik dari masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut (Dahlan, 1991 : 7).

Berbicara politik internasional tidak terlepas dari politik luar negeri. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara lainnya, sebagai respon terhadap suatu kejadian dan isu-isu dalam dunia internasional. Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan

kemampuan (kapabilitas) nasional (Coloumbis, 1999 : 89-90). Politik luar negeri dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang menjadi kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional merupakan suatu nilai-nilai yang hendak dicapai, diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara (Coloumbis, 1999: 89).

Dalam kamus hubungan internasional Plano & Olton, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) adalah :

> "Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup baangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi" (1999 : 5-7).

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2008 : 20). Dalam hal ini, adalah suatu negara yang merupakan kelompok kepentingan (pemerintah) yang membuat suatu kebijakan untuk memperoleh kepentingan negara-nya.

Pada penelitian ini penulis mengangkat kebijakan dari Amerika Serikat yaitu tentang kebijakan memerangi terorisme, *War On Terrorism* yang kemudian tidak hanya ke dalam tapi juga ke luar. Dalam hal ini, kebijakan yang merupakan kepentingan nasional pemerintah AS yang tertera dalam *The National Security Strategy of The United States of America* yang dikeluarkan September 2002 dan Maret 2006 dengan jelas mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi

terorisme. Karena, terorisme bukan hanya membahayakan AS saja, tapi dapat membahayakan setiap negara manapun.

National Security Strategy merupakan sebuah strategi yang dikeluarkan AS untuk melindungi negaranya dari ancaman luar yang cenderung memusuhi AS, selain itu juga untuk menghadapi serangan teroris dan ancaman terhadap penggunaan senjata pemusnah masal. Dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer, strategi adalah :

> "Suatu ancang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mengacu pada rencana yang menyeluuruh dan jangka panjangyang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh" (Kaelola, 2009 : 326).

Sedangkan menurut May Rudi, strategi merupakan :

> "Seluruh keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijakankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu di masa depan dan kemudian dari semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut. Strategi pertahanan dirumuskan untuk menghadapi gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan nasional yang sebab inisialnya datang dari luar wilayah nasional. Strategi keamanan dirumuskan untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap keamanan nasional yang timbul dari dalam negeri sendiri, diarahkan oleh elemen-elemen dari wilayah nasional guna kepentingan atau keuntungan-keuntungan elemen-elemen tersebut" (2001 : 1).

Dalam strategi keamanan nasional AS 2002 tersebut terdapat 8 tujuan utama, yaitu :

1. Memenangkan aspirasi bagi martabat manusia;

2. Memperkuat aliansi untuk mengalahkan terorisme global dan bekerja untuk mencegah serangan kembali terhadap kami dan teman-teman kami;
3. Bekerja sama dengan yang lain (negara) untuk meredakan konflik regional;
4. Mencegah serangan musuh-musuh terhadap kami, sekutu kami (aliansi), dan teman-teman kami, melalui penggunaan senjata pemusnah massal;
5. Mempelopori era baru dalam pertumbuhan ekonomi global melalui pasar bebas dan perdagangan bebas;
6. Memperluas pembangunan infrastruktur masyarakat dengan membuka dan menyebarkan demokrasi;
7. Mengembangkan agenda untuk bekerjasama dengan menjadi pusat utama dari kekuatan global; dan
8. Mengubah lembaga keamanan nasional AS untuk memenuhi peluang menghadapi abad dua puluh satu (NSS 2002 : 1-2).

Dalam point kedua NSS 2002 dengan jelas AS menyatakan untuk memerangi terorisme global, dan mengajak aliansi dan negara sahabat untuk bersama-sama berperang melawan terorisme. Kebijakan tersebut yang kemudian dikenal dengan *War On Terrorism* adalah suatu kebijakan untuk memerangi terorisme, yang merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah AS sebagai reaksi terhadap serangan 9/11 untuk memerangi aksi terorisme. Kebijakan tersebut merupakan salah satu agenda pemerintah AS dibawah kepemimpinan Bush.

Berdasarkan point kedua dalam NSS 2002 tersebut, beberapa bulan kemudian AS mengembangkan strategi khusus dalam memerengi terorisme, yaitu *National Strategy for Combating Terrorism*. NSCT tersebut yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang harus diambil untuk memerangi terorisme. NSCT merupakan strategi AS untuk memerangi terorisme, melalui NSCT itu AS beserta Aliansinya memerangi terorisme. Dalam NSCT perang melawan terorisme dilakukan dengan dua visi, yaitu perang dengan kekuatan dan perang dengan ideologi.

NSCT ini sebagai kelanjutan dari strategi AS untuk memerangi terorisme perlu dikeluarkan sebagai dasar tindakan AS dan Aliansinya untuk memerangi terorisme global. Untuk memerangi terorisme dibutuhkan strategi yang sangat efektif, sehingga dapat mengatasi ancaman dari segala dimensi. Sehingga dalam NSCT 2006, ditetapkan 2 langkah untuk memerangi terorisme, yakni Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Terorisme dianggap dapat mengancam stabilitas keamanan nasional maupun stabilitas internasional (NSCT, 2006 : 9).

Presiden AS, George W. Bush dalam kajian mengenai perang melawan terorisme, menyatakan bahwa terdapat Dua pilar penting yang dikedepankan, yakni :

1. Mempromosikan secara terus menerus tentang kebebasan, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Melakukan konfrontasi secara agresif bagi siapa saja yang menentang demokrasi tersebut (Thamrin, 2007 : 31).

Terorisme yaitu hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik) (Partanto & Barry, 1994 : 748).

Sedangkan menurut Golose terorisme merupakan :

> "Setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*)" (2009 : 6).

Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) melalui *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* mendefinisikan terorisme sebagai berikut :

> "Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cidera serius pada rakyat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan" (Golose, 2009 : 4).

Kampanye perang melawan terorisme tersebut jelas sangat mempengaruhi politik internasional tiap-tiap negara, khususnya negara-negara yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintahan AS. Amerika Serikat dengan tegas menyatakan melalui pidato Bush, untuk memerangi terorisme, "*either you are with us, or you are with terrorist*," sehingga mau tidak mau negara-negara di dunia ikut mendukung pemerintah AS.

Menurut Holsti pengaruh (*influence*) dapat didefinisikan sebagai alat-alat persuasi untuk menjaga dan merubah perilaku aktor lain dengan cara-cara yang sesuai dengan preferensi dan keinginan aktor tertentu (1987 : 88). Beberapa

pemerintahan dan negarawan akan mencari pengaruh untuk kepentingan negaranya, mereka menggunakannya untuk mencapai atau mempertahankan tujuannya. Oleh karena itu, pengaruh dapat menjadi aspek penting dalam mencapai sebuah tujuan.

Terdapat beberapa strategi Amerika Serikat untuk memenangi perang melawan terorisme yang salah satunya membuat masyarakat Muslim merasa dan meyakini bahwa Islam yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut, yaitu : Mendukung pemerintahan moderat dan modern, terutama di dunia Muslim, untuk memastikan bahwa kondisi dan ideologi yang mendukung terorisme tidak menemukan tempat untuk berkembang di negara manapun (NSS 2002 : 6).

Hal tersebut menandakan adanya perhatian khusus AS terhadap dunia Islam pasca serangan 9/11. Terutama di negara-negara Timur Tengah, Afrika sampai Asia. Termasuk Indonesia sebagai negara dengan mayoritas ummat Islam dan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Karena dalam NSS Amerika Serikat yang dikeluarkan tahun 2006 Indonesia disebut sebagai salah satu tempat teroris. Dokumen resmi AS tersebut menyatakan *" ...* teroris telah berada di banyak tempat, termasuk Afghanistan, Mesir, Indonesia, Irak, Israel, Yordania, Maroko, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Spanyol dan Inggris Raya*... "* (NSS 2006 : 9).

Indonesia yang pada awalnya tidak terlalu memikirkan mengenai terorisme, mulai berfikir untuk ikut mendukung memerangi terorisme pasca tragedi bom Bali pada tahun 2002. Terbukti dengan diberlakukannya Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan disahkannya Perpu tersebut

terhadap kasus bom Bali. Selain itu ada tuduhan Barat terhadap kelompok-kelompok Islam di Indonesia terlibat dengan jaringan terorisme internasional.

Dengan dikeluarkannya kebijakan *War On terrorism*, yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang menumbuhkan terorisme jelas sangat membuat kecewa umat Islam. Serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tempat beradanya teroris, membuat pandangan Barat terhadap gerakan Islam di Indonesia semakin negatif di mata Barat dan AS.

Kebijakan *War On Terrorism* secara tidak langsung memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan Islam. Dengan menjadikan Ideologi Islam sebagai sasaran kebijakan tersebut membuat kelompok gerakan Islam merasa menjadi sasaran dari kebijakan. Perkembangan dari suatu kelompok gerakan dapat dilihat dari eksistensi dan konsistensi kelompok gerakan tersebut dalam memperjuangkan visi dan misinya.

Realitas politik domestik maupun internasional yang terjadi belakangan ini, dirasa telah menyudutkan Islam, sehingga mendorong kalangan Islam untuk bereaksi keras dengan menampilkan diri sebagai gerakan fundamentalis-radikal, yang menampilkan simbol-simbol anti-AS dan sekutu-sekutunya. Fundamentalis-radikal merupakan semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 4-5).

Kelompok Islam dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok, diantaranya kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modern dan Kelompok Islam campuran. *Pertama,* kelompok Islam tradisional yaitu kelompok Islam yang secara amaliah ibadah mengikuti tradisi keagamaan model Nahdathul Ulama (NU). Pandangan kelompok ini terhadap hubungan agama dan negara bersifat substansialis, bukan formalistik dan strukturalis. Dan dalam batas-batas tertentu kelompok tradisional cenderung menggunakan simbol-simbol keagamaan. *Kedua*, kelompok Islam modernis, yaitu kelompok yang secara amaliah ibadah mengikuti model Muhammdiyah atau Persis. Kelompok ini memandang hubungan agama dan negara bersifat formal, bahkan sampai tingkat tertentu mereka mengupayakan untuk menegakan syari'at Islam. Dan *ketiga* adalah kelompok Islam campuran, yang merupakan kelompok perpaduan antara kelompok tradisional dan kelompok modernis (Zen, 2004 : 23-24).

Syarifuddin Jurdi dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam Indonesia* juga memetakan kelompok-gerakan Islam yakni *Pertama, Islam Fundamentali-Radikal*. Kelompok ini berada pada absolutisme pemikiran yang mendasarkan diri pada Islam serta menempatkan Islam sebagai tindakan politiknya (formalisasi syariat Islam) dan menampilkan simbol-simbol Jihad dalam melaksanakan upaya-upayanya. Horace M. Kalle mendefinisikan kelompok ini sebagai respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respon tersebut berbentuk evaluasi, penolakan bahkan perlawanan. *Kedua, Islam Formalis-Simbolik* yang menghendaki penampilan atau simbol-simbol secara konstitusional harus berlabelkan Islam, seperti memasukan kembali sila pertama dalam Piagam

Jakarta. Namun, kelompok ini lebih banyak bermotif politik dari pada menekankan atau membela nilai-nilai Islam secara keseluruhan. *Ketiga, Islam Rasional-Inklusif,* kelompok ini lebih menekankan pada pemahaman ajaran Islam secara terbuka. Kelompok ini juga memberikan peluang terhadap pluralisme agama dan menghendaki ajaran Islam dapat dimengerti oleh umat Islam sendiri maupun non-Muslim. Mereka juga menginginkan Islam yang inklusivistik, artinya tidak terpaku secara rigid dan literalis seperti dalam Al-Qur'an.

Keempat, Islam Emansipatoris-Transformatif yang menekankan pada misi Islam yang utama, yakni kemanusiaan dan pemberdayaan. Perhatian kelompok ini bukanlah pada permasalahan teologi maupun politik, tetapi lebih berorientasi kepada masalah sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. *Kelima, Islam Liberal*. Kelompok ini melihat Islam sebagai komponen pengisi kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu harus diarahkan sebagai faktor komplementer, dan bukan sebagai faktor yang disintegrasi terhadap negara atau komunitas lain. Kelompok ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari kelompok pertama dan kelompok kedua dan bahkan dalam beberapa hal kelompok ini memusuhi agenda-agenda kelompok pertama dan kedua (2008 : 329-335).

Selain pada tingkat gerakan, terdapat beberapa tipologi Islam yang dikelompokan kedalam, *pertama Islam tradisional* kelompok ini membiarkan praktik keagamaan bercampur dengan kebudayaan dan tradisi masyarakat yang tidak dianjurkan dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan Nabi. Pada umumnya kelompok ini dalah masyarakat terbelakang maupun pedesaan. *Kedua, Islam Modernis* yang mencoba memahami Islam secara aktual dan rasional.

Kelompok ini menekankan kembali pada Islam yang otentik, Islam yang murni sesuai dengan spirit Islam. *Ketiga, Islam Puritan* yang menekankan pada ekspresi ekstetik atau keindahan Islam. Dan *Keempat, Islam Kiri* yang mencoba memahami Islam dari sisi sosialisme maupun marxisme. Islam kiri lebih menekankan pada telaah kritik terhadap sistem sosial, heurmeneutika teks dan tafsir sosial kontemporer dalam pandangan marxis (Jurdi, 2008 : 336-337).

Melihat pengklasifikasian tersebut, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia seolah menjadi target selanjutnya dalam isu terorisme setelah Taliban di Afghanistan. Yang menjadi sasaran AS adalah apa yang disebutnya dengan "Gerakan Islam radikal" seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (Ibrahim & Romli, 2007 : 21). Selain itu terdapat juga beberapa kelompok Islam radikal lainnya di Indonesia, Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), serta kelompok-kelompok kecil yang ingin menegakan syariat Islam lainnya. Meskipun memiliki perbedaan kultural dan mungkin juga perbedaan pemahaman Islam, gerakan-gerakan Islam tersebut memiliki tujuan yang sama. Kesamaan nasib dan solidaritas diantara gerakan-gerakan Islam tersebut yang melihat umat Islam telah didominasi kekuatan negara atau kekuatan internasional yang cenderung menyerang kredibilitas Islam, membuat mereka bangun dan berjuang dengan mengatasnamakan Islam (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 105).

Dalam studi ini penulis mengambil kasus Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).MMI didirikan dengan misi menegakan syariat Islam di tanah air. Bagi

MMI Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah melalui hambanya di dunnia. Menurut MMI, formulasi syariat Islam secara umum sebenarnya telah tertuang dalam piagam Jakarta. Berkaitan dengan penerapan syariat Islam ini, MMI telah menyusun konsepnya baik dibidang politik, sosial-ekonomi, pertahanan dan bidang lainnya. Dengan mendudukan syariat Islam sebagai rujukan maka semua pertimbangan dan tindakan, menurut para tokoh MMI, harus diarahkan melalui tegaknya syariat Islam di Indonesia (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 249-252).

Selain penerepan syariat Islam, MMI secara eksplisit memaklumatkan perlunya perombakan struktur kenegaraan menjadi Daulah Islamiyah dibawah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Karena hanya melalui Daulah Islamiyah pemberlakuan syariat Islam dapat terjamin (Mubarak, 2007 : 347).

MMI menolak demokrasi dan tidak setuju dengan nasionalisme yang dianggapnya sebagai pengkotakan. Nasionalisme dan demokrasi dianggap sebagai malapetaka bagi ummat Islam karena dengan demokrasi ummat Islam terpecah-pecah dalam banyak kelompok. Demokrasi juga bisa melahirkan aturan dan perundangan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan syariat Islam (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 255).

Tujuan MMI adalah menegakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga syariat Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Sistem dan manhaj perjuangan MMI adalah dakwah wal jihad, berdasarkan Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan prinsip

perjuangan penegakan syariat Islam MMI berlandaskan ajaran Tauhid yang utuh (Risalah Mujahidin, Oktober-November 2008 : 28-29).

Sebagai sebuah gerakan berasaskan Islam, MMI merupakan salah satu bidikan AS di kawasan Asia Tenggara. Menurut AS adanya keterlibatan jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Adalah status Amirul MMI, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai terpidana kasus penolakan asas tunggal Pancasila beberapa tahun yang lalu, yang memaksa Indonesia terlibat dalam kekuatan internasional untuk memerangi MMI (Ibrahim & Romli, 2007 : 23-24).

Namun, pemerintah AS melalui presiden George Bush dalam kunjungannya ke Indonesia pada 2003 menyatakan bahwa, dalam memerangi terorisme internasionalnya AS bukan memerangi Islam, akan tetapi memerangi kelompok atau jaringan yang menggunakan semangat ajaran Islam sebagai pembenaran bagi mereka untuk melakukan tindakan yang menentang kebebasan dan melakukan pembunuhan. Hal tersebut tidak akan dibenarkan, dan tidak ada tempat bagi mereka di manapun termasuk di Indonesia (http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031022090934esrom0.6157953.html diakses 20 Juli 2010).

Pernyataan Bush tersebut mengindikasikan bahwa AS, akan mengawasi seluruh kelompok atau gerakan Islam, termasuk gerakan Islam di Indonesia. Para pemikir Barat juga menafsirkan kelompok Islam yang dianggap radikal melalui 3 hal, yakni Syariat Islam, Jihad dan Khilafah Islamiyah. Bagi Barat Syariat Islam dianggap dapat mengekang kebebasan dan HAM. Jihad, dilihat sebagai upaya

kelompok Islam sebagai pembenaran dalam memerangi Barat yang dianggap kelompok Islam radikal sebagai 'kafir' (http://astiol.com/terorism/4-national-terorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html diakses 20 Juli 2010).

Menyusul pernyataan presiden George Bush, Matthew P. Daley yang merupakan *Deputi Assistant Secretary Bureau Of East Asian And Pacific Affairs Departemen Of States* dalam pidatonya mengenai *U.S Counter-Terrorism For East Asia And The Pacific*, membebarkan bahwa berkenaan dengan isu terorisme di Indonesia hal tersebut dikarenakan adanya keinginan sekelompok golongan keagamaan ekstrimis dan radikal yang ingin mengganti sistem politik di Indonesia dengan ideologi tertentu (http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031029163709esrom0.3230097.html diakses 20 Juli 2010).

Tri Poetranto dari Puslitbang Strahan Balitbang Dephan juga membenarkan Adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi yang berorientasi pada Agama. Ada upaya-upaya kelompok agama yang ingin memasukan Syariat Islam secara konstitusional. Keinginan gerakan-gerakan Islam untuk menegakan syariat Islam sebagai landasan hidup bangsa Indonesia melalui serangkaian kegiatan jalur formal maupun non-formal dan tidak jarang dilakukan secara ekstrim. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup antar umat beragama yang rentan menimbulkan perselisihan dan konflik (http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010).

Berbagai gerakan (politik) Islam yang menjadi oposan rezim-rezim sekuler pro Barat atau AS dicap sebagai gerakan teroris. Lebih spesifik lagi, ummat Islam yang mengkampanyekan penerapan Syari'at Islam dan menyerukan Jihad melawan AS dan sekutu-sekutunya (Ibrahim & Romli, 2007 : 19).

Dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer :

> Gerakan adalah suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga politik atau menciptakan kehidupan masyarakat baru. Gerakan sosial yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) dalam masyarakat. Fokus gerakan sosial diarahkan pada reaksi atau perlawanan terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat dan juga hubungan kekuasaan yang terjadi antara masyarakat dan negara (Kaelola, 2009 : 114-115).

Radikal secara bahasa berarti mengakar, gerakan radikal berarti suatu gerakan yang menuntut perubahan secara fundamental yang menyangkut penggantian dasar-dasar nilai tertentu. Bila dikaitkan dengan keagamaan, khusunya dalam konteks Islam harus dipahami sebagai upaya implementasi psinsip-prinsip Islam secara *kaffah* (utuh) dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berupaya agar nilai-nilai Islam mewarnai setiap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial maupun politik (Turmudi dan Sihbudi, 2005 : 281).

M. Zaki Mubarak mendefinisikan Gerakan Islam radikal dalam bukunya Genealogi Gerakan Islam Radikal di Indonesia sebagai,

> tindakan yang secara sadar dilakukan, baik merupakan aksi, reaksi, maupun tanggapan, yang dilandasi oleh seperangkat sistem keyakinan (ideologi) Islam yang dianut oleh kelompok-kelompok tersebut. Gerakan ini bersifat kolektif dan terorganisir, serta bertujuan untuk melakukan perubahan tatanan lama (sistem nilai, budaya, politik yang bersifat sekularistik) ke arah tatanan yang benar-benar baru (bersifat nilai-nilai Islam) (2007 : 53).

Menurut Zastrouw, dalam bukunya Gerakan Islam Simbolik memberikan penjelasan tentang gerakan Islam radikal yaitu :

> Gerakan Islam radikal merupakan bentuk resistensi (perlawanan) atas gerakan modernisasi yang mereka anggap sebagai proses sekularisasi. Islam merupakan satu-satunya sumber penyelesaian atas berbagai problem kemanusiaan, dan melalui gerakan tersebut mereka memperjuangkannya (2006 : 9).

Gerakan Islam radikal merujuk pada konsep fundamentalis Islam yang di kemukakan Martin E. Marty, terdapat beberapa prinsip yang dipegang oleh kelompok fundamentalis Islam : *Pertama*, perlawanan (*oppositionalism*). Menurut Marty, fundamentalisme dalam agama apapun mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun tata nilai barat pada umumnya. *Kedua*, penolakan pada hermeneutika. Dengan kata lain, kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. *Ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis pluralitas merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. *Keempat*, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literer kitab suci (Zastrouw, 2006 : 34).

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan *War On Terrorism* AS yang jalankan melalui strategi keamanan nasional AS, merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk menghancurkan tindakan terorisme dan menghilangkan pemahaman yang mendukung dan memunculkan bibit-bibit

berkembangnya terorisme dimanapun. Dengan upaya melakukan perang secara langsung terhadap kelompok teroris maupun dengan upaya menghilangkan paham-paham atau ideologi yang mendukung munculnya terorisme, dan menggantinya dengan paham demokrasi AS.

MMI yang menghendaki penerapan syariat Islam dan didirikannya Darul Islam (negara Islam) serta mengajarkan Jihad, dinilai AS dapat melahirkan terorisme. Oleh karena itu, MMI menjadi salah satu target sasaran AS dengan melaksanakan kebijakan *War On Terrorism.* Hal tersebut terbukti, setelah pemerintah Indonesia menangkap Abu Bakar Ba'asyir dengan dalih kasus penolakan asas tunggal Pancasila yang dilakukan pada tahun 1982. Abu Bakar Ba'asyir menilai, AS berada dibalik putusan yang sudah kadaluarsa tersebut (http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/abubakarbaasyir/index.shtml.diakses 25 Desember 2009).

Walaupun ditahannya Abu Bakar Ba'asyir tidak terkait dengan MMI selaku organisasi yang dipimpinnya, akan tetapi hal tersebut akan membawa dampak politis terhadap perkembangan MMI. Penolakan atas pluralisme dan keberagaman publik, semakin membuat pemerintah terus mewaspadai tindak-tanduk kelompok gerakan ini yang khawatir akan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Selain kekhawatiran pemerintah terhadap perkembangan MMI, telah membuat eksistensi MMI terancam. Keluarnya pemimpin atau Amir MMI Abu Bakar Ba'asyir pun semakin melemahkan posisi MMI sebagai sebuah organisasi. Abu Bakar Ba'asyir menganggap organisasi MMI sudah tidak sesuai dengan

ajaran Islam dan menyalahi aturan Islam. Pernyataan Abu Bakar Ba'asyir tersebut mengindikasikan bahwa MMI sudah tidak konsisten untuk menjalankan dan mencapai tujuan dari MMI. Serta, pasca keluarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari MMI semakin membuat posisi MMI melemah, karena beliau bersama para mantan anggota MMI kemudian mendirikan suatu organisasi baru yang disesuaikan dengan aturan Islam. kelompok yang dipimpin langsung oleh Abu Bakar Ba'asyir tersebut kemudian diberi nama Jamaah Anshoruttauhid (http://www.detiknews.com/read/2008/08/06/111418/983776/10/baasyir-dirikan-organisasi-baru.diakses 17 Desember 2009).

1.6.2 Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran dan asumsi dasar diatas, maka dapat disusun hipotesis yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat untuk memerangi terorisme internasional melalui *National Strategy for Combating Terrorism*, memberikan pengaruh terhadap perkembangan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai sebuah kelompok gerakan Islam radikal di Indonesia, dengan melemahnya eksistensi maupun keanggotaan kelompok".

1.6.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis akan memberi definisi operasional dari variabel-variabel Pengaruh *War On terrorism* terhadap perkembangan Gerakan Islam radikal di Indonesia.

1. Kebijakan *War On Terrorism*, merupakan sebuah respon pemerintah Amerika Serikat terhadap tindakan terorisme yang dapat mengancam siapa saja, termasuk AS Sendiri. Kebijakan ini diperuntukan melindungi kedaulatan negara dan juga seluruh warga negara AS.
2. Gerakan Islam Radikal merupakan bentuk resistensi (perlawanan) atas gerakan modernisasi yang mereka anggap sebagai proses sekularisasi dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber penyelesaian atas berbagai problem kemanusiaan.
3. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan sebuah kelompok gerakan Islam di Indonesia yang memperjuangkan penerapan syariat Islam dan mendirikan sebuah negara Islam dengan menggantikan sistem yang ada saat ini dengan sistem yang sesuai dengan Islam.
4. *National strategy for combating terrorism* (NSCT) merupakan langkah-langkah atau strategi khusus yang dibuat Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme global.
5. Eksistensi adalah keadaan yang dilakukan untuk mengekspresikan identitas dirinya sendiri, artinya bukan hanya ada atau tidaknya melainkan cara dirinya untuk menunjukan keberadaan dirinya.

Keanggotaan, merupakan bagian atau termasuk kedalam golongan tertentu.

6. Keanggotaan, merupakan orang yang menjadi bagian dalam suatu golongan.

1.7 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peratutan yang terdapat dalam penelitian. Dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.(Silalahi, 2006 : 11)

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*Descriptif Research*), yaitu mendiskripsikan dan menganalisa kejadian-kejadian berdasarkan data-data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis keterkaitannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan. Disamping berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi, juga memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi yang sedang dipelajari. Dengan kata lain, dengan metode ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan peristiwa secara cermat dan terperinci sehingga diperoleh pemahaman tentang sesuatu yang telah terjadi.

Dalam hal ini, penulis ingin memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh dari kebijakan Amerika Serikat, *War On Terrorism* terhadap perkembangan gerakan Islam radikal di Indonesia.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis berusaha mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan mencari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya serta penelitian lapangan dengan metode wawancara. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat kualitataif, data yang dikumpulkan pun lebih bersifat kualitatif, sehingga diperlukan ketajaman dalam memilih dan memisahkan data, untuk selanjutnya disajikan secara deskriptis analitis.

1.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sebagaimana halnya penelitian yang bersifat kepustakaan dilakukan di Bandung, Jawa barat, antara lain :

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
   Jl. Dipati Ukur No. 112-116 - Bandung.
2. Perpustakaan Pusat FISIP Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)
   Jl. Ciumbuleuit No. 94 - Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Univertsitas Padjajaran (UNPAD)
   Jl. Jatinangor - Sumedang.

4. Kantor Pusat Majelis Mujahidin Indonesia

   Jl. Karanglo No. 94 - Yogyakarta

5. *Information Resource Center* Kedutaan Besar Amerika Serikat

   Jl. Medan Merdeka Selatan No. 5 - Jakarta.

6. Kajian Wilayah Amerika Serikat

   Jl. Salemba Raya No. 4 - Jakarta

7. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

   Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 – Jakarta.

1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan oleh peneliti untuk pra penelitian (tahap pengenalan, pemahaman, dan pendalaman masalah) yaitu di mulai sejak bulan Juli 2009 dan direncanakan selesai bulan Agustus 2010.

Tahun		2009						2010							
No	Aktifitas	Jul	Agus	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Penyusunan Usulan Penelitian														
2	Ujian Usulan Penelitian														
3	Pengumpulan Data														
4	Pengolahan Data														
5	Sidang Akhir														

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Rencana Usulan Penelitian Skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis ini adalah sebagai berikut :

Bab I, *Pendahuluan*, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis serta definisi operasional, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab II, *Tinjauan Pustaka*, berisi uraian dan penjelasan teori-teori serta konsep-konsep dalam studi hubungan internasional yang relevan dengan penelitian ini, yang terdiri dari hubungan internasional, politik internasional, politik luar negeri serta strategi nasional.

Bab III, *Obyek Penelitian*, berisi obyek-obyek yang akan dikaji dalam penelitian, dalam hal ini mengenai Strategi kebijakan Amerika Serikat dalam upaya mencegah dan memerangi terorisme melalui kebijakan *War On Terrorism* yakni melalui *National Strategy For Combating Terrorism* serta kelompok gerakan Islam radikal di Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai gerakan Islam radikal di Indonesia.

Bab IV, *Hasil Penelitian dan Pembahasan*, merupakan kajian yang menganalisis dan membahas obyek penelitian (Bab III), yang didasarkan pada tinjauan pustaka pada Bab II dalam upaya pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya terhadap melemahnya perkembangan gerakan Islam radikal di

Indonesia. Bab ini juga merupakan inti dari penelitian, karena untuk mengetahui dampak dari kebijakan *War On Terrorism* terhadap Majelis Mujahidin Indonesia.

Bab V, *Kesimpulan dan Saran*, merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran dari penulis dalam konteks sebagai peneliti.

Daftar Pustaka

Daftar Buku :

Art, Robert. 2003. *A Grand Strategy For America*. Washingthon D.C : United States Institute of Peace Press.

Brokers, Mathias. Ed. Godjali. 2003. *Konspirasi, Teori-Teori Konspirasi dan Rahasia 11-9*. Jakarta : Ina Publikatama.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Columbis, Theodor A. Dan Wolf, James H. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power.* Bandung : CV. Abardin.

Hasan, Noorhaidi. 2008. *Laskar Jihad : Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Holsti, K. J. 1990. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta : Erlangga.

Ibrahim, Idi Subandy dan Romli, Asep Syamsul M. 2007. *Amerika, Terorisme Dan Islamphobia, (Fakta Dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal).* Bandung : Nuansa.

Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta : Cakrawala.

Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia, (Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi).* Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Partanto, Puis A dan Barry, M. Dahlan Al. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Rosdakarya.

Plano, Jack C dan Olton, Roy. Ed. Juanda, Wawan. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Putra A Bardin.

Purnomo, Agung. 2009. *Ideologi Kekerasan : Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global, (Isu, Konsep, Teori Dan Paradigma).* Bandung : Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press.

Thamrin, Muhammad Ikhlas. 2007. *Densus 88 Undercover*. Solo : Quo Vadis.

Turmudi, Endang dan Sihbudi, Riza. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press.

Zastrouw, Ng Al. 2006. *Gerakan Islam Simbolik.* Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.

Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik : Analisis Wacana Media*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.

Daftar Dokumen :

Risalah Mujahidin, Oktober-November 2008

The National Security Strategy Of The United States Of America 2002.

The National Security Strategy Of The United States Of America 2006.

The National Strategy For Combating Terrorism 2006.

National Strategy For Homeland Security. Homeland Security Council 2007.

Daftar Artikel dalam Situs :

Auda, Jasser. Klasifikasi ideologi Islam. Dalam : http://readingislam.com/servlet/satellite?c=article_c&cid=1234825059986&pagename=zone-english-discover_islam%2FDIELayout. diakses 10 Januari 2010

Denny, JA. Laskar Jihad, FPI dan Mujahidin. dalam http://www.islamlib.com/id/artikel/laskar-jihad-fpi-dan-mujahidin/diakses 10 Januari 2010

http://www.detiknews.com/read/2008/08/06/111418/983776/10/baasyir-dirikan-organisasi-baru.diakses 17 Desember 2009

http://www.simplicitydata.com/PDFdocument/radical%20Islamism%20Implications%20realease%201b.PDF.diakses 10 Januari 2010

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/abu-bakar-baasyir/index.shtml.diakses.25 Desember 2009

Poetranto, Tri. Puslitbang Strahan Balitbang Dephan. Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dalam rangka menjaga NKRI, dalam http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010

Sutiyono, Imam. Mewaspadai dikotomi gerakan Islam. dalam http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=6561. diakses 10 Januari 2010

www.freedom-institute.org/id/doc/utk_web-paramadina.doc. diakses Oktober 2009.

Yuliantoro, Nur Rachmat. 11 september 2001 : Babak baru hubungan Barat-Islam? dalam : rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/119.pdf. diakses Oktober 2009.